



PICU MASALAH SOSIAL, JADI FENOMENA GUNUNG ES Sigit Wicaksono Desak Hasto Bubarkan KMS

YOGYA (KR) - Program Kartu Menuju Sehat (KMS) yang telah bergulir sejak puluhan tahun di Kota Yogya dinilai sudah tidak representatif lagi. Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono pun mendesak Walikota Yogya Hasto Wardoyo untuk membubarkan program tersebut.

Sigit Wicaksono menegaskan dari aspek manfaat justru KMS lebih banyak madharat atau dampak buruknya. Terutama berbagai masalah sosial yang dipicu dari program tersebut. "Ini sudah menjadi gunung es di wilayah. Terutama bagi aparat RT dan RW. Banyak dari mereka yang tidak lagi bertegur sapa hanya gara-gara KMS. Kalau perangkat wilayah saja bisa musuhan apalagi masyarakatnya," urainya, Minggu (9/3).

KMS yang setiap tahun selalu memicu masalah sosial tersebut berawal dari proses pendataan maupun validasi calon penerima. Hal ini karena peran RT dan RW cukup vital dalam memberikan rekomendasi atau penilaian. Di tingkat bawah bahkan sudah saling sepakat untuk gantian. Hal ini

karena tidak sedikit warga yang seharusnya dapat KMS namun justru tidak masuk penerima. Sebaliknya, warga yang dari strata sosialnya mampu justru mengantongi KMS. Sehingga jika tahun ini jatah si A maka tahun depan menjadi kesempatan bagi si B.

Akibatnya, imbuh Sigit Wicaksono, hal tersebut justru menjadi gaduh di masyarakat. Selamanya akan terus begitu dan sewaktu-waktu jika tidak ada pendekatan yang baik, akan meledak menjadi persoalan serius. "Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) harus membuka mata persoalan tahunan ini. Jangan hanya bersembunyi di balik meja. Sehingga ini menjadi momentum bagi walikota baru untuk membubarkan KMS karena madharatnya jauh lebih besar dari manfaatnya," paparnya.

Sigit Wicaksono menambahkan, berbagai bantuan sosial saat ini sudah mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Termasuk di dalamnya ialah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Kartu Indonesia Pintar. Oleh karena itu otomatis manfaat KMS semakin

berkurang. Peruntukan KMS saat ini lebih pada mendapatkan kuota sekolah negeri, santunan kematian maupun tunggakan biaya pendidikan. Sedangkan biang kerok warga berebut KMS ialah untuk mendapatkan kuota masuk sekolah negeri. Hal ini yang memicu terjadinya masalah sosial hingga membuat aparat di tingkat RT dan RW saling bermusuhan.

Sebagai solusi atas pembubaran KMS, imbuhnya, ialah dengan membuat regulasi yang jelas dan tegas. Misalnya santunan kematian sudah tidak diperlukan lagi manakala Pemkot berani menyediakan layanan pemakaman secara gratis untuk seluruh warga. Begitu pula tunggakan biaya pendidikan, bisa diakses oleh siapapun yang mendapatkan rekomendasi dari Dinsosnakertrans. Sedangkan kuota sekolah negeri bisa mengacu pada DTKS. "Ini momentum bagi walikota baru. Sekaligus juga saatnya jajaran ASN bekerja secara optimal. Dulu selama kota ini dijabat oleh penjabat (Pj), banyak ASN yang hanya mencari aman. Saya yakin, dari program unggulan walikota sudah mampu menggantikan peran KMS," tegasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005